

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan				
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Kinerja Utama (esselon II)						
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN				
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi	
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya	
					TOTAL	100		
		2. Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Prosentase penegakan peraturan perundang-undangan daerah provinsi dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Alasan Pemilihan indikator: untuk efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tingkat provinsi dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				
				Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum Cakupan\ yan\ trantibum, penegakan\ Perda, linmas\ dan\ koordinasi\ kebakaran}{4} \times 100$				
		Indikator Kinerja Program (esselon III)						
		1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	IKM = $\frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$				
				IKM Unit Pelayanan x 25				
				Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan					
				1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	
				2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	
				3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	
				4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik	
		2. Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum $\frac{\Sigma \text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\Sigma \text{Pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100$					
		3. Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Prosentase penegakan peraturan perundang-undangan Provinsi	Alasan pemilihan indikator: untuk efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tingkat provinsi $\frac{\Sigma \text{Penegakan peraturan perundangan – undangan}}{\Sigma \text{Pelanggaran peraturan perundangan – undangan}} \times 100$					
		4. Cakupan perlindungan masyarakat	Prosentase penanganan perlindungan masyarakat	Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja penanganan perlindungan masyarakat $\frac{100 \text{ orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru}}{1 \text{ wilayah kerja kabupaten/kota}} \times 100$					
		5. Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	Prosentase koordinasi penanganan bencana kebakaran	Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja pelayanan bencana kebakaran $\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten/kota}} \times 100$					